

**Tabel 3.8 Penyanggah Permasalahan Kesejahteraan Sosial pada Anak Kota Semarang Tahun 2022**

No.	Uraian	Jumlah			Satuan
		L	P	Jumlah	
1	Balita terlantar	2	1	<b>3</b>	anak
2	Anak terlantar	4	3	<b>7</b>	anak
3	Anak yang tinggal di panti asuhan	2	2	<b>4</b>	anak
4	Anak jalanan				anak
5	Anak terdampak pandemi	73	63	<b>136</b>	anak
6	Kasus anak yang ditangani Dinsos dan didampingi SAKTI Peksos	13	27	<b>40</b>	kasus
7	Perkawinan Anak				anak
8	Anak mengalami kekerasan	1	2	<b>3</b>	anak
9	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	4	<b>5</b>	anak
10	Anak-anak dengan keterbatasan atau disabilitas	10	7	<b>17</b>	anak
11	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1		<b>1</b>	anak
12	Anak dalam situasi rentan	186	169	<b>255</b>	anak

Sumber: Dinas Sosial melalui DP3A Kota Semarang 2023

Tabel tersebut menjelaskan PMKS yang terjadi pada anak di Kota Semarang pada tahun 2022. Data tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan sosial yang dihadapi oleh implementasi KLA di Kota Semarang paling tinggi pada kasus anak dalam situasi rentan dengan jumlah 355 anak, kemudian disusul kasus anak terdampak pandemi dengan kasus 136 anak, dan kasus sosial anak (yang telah masuk dalam penanganan Dinsos) sebanyak 40 kasus.

Berdasarkan hasil pembahasan dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam implementasi KLA di Kota Semarang. Secara garis besar kondisi tersebut lebih besar dipengaruhi dan berpengaruh pada kondisi sosial. Kondisi sosial

pernikahan dini yang berada pada 248, kasus kekerasan anak sebanyak 231 sepanjang tahun 2020-2023, dan kompleksitas PMKS pada anak di Kota Semarang turut memberikan andil sebagai latar belakang adanya implementasi kebijakan KLA di Kota Semarang. Kondisi sosial tersebut juga tidak usai meskipun pada tahun 2023 secara resmi Perda KLA Kota Semarang dapat mampu diimplementasikan.

### **3.1.6 Disposisi Pelaksana**

Diposisi pelaksanaan dalam implementasi KLA tidak jauh dari pengaruh yang diberikan oleh pembahasan kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada sub-subbab sebelumnya. Disposisi pelaksanaan ini timbul sebagai bentuk respons dari DP3A Kota Semarang yang harus disadari terhadap permasalahan yang terjadi dalam implementasi KLA di Kota Semarang. DP3A Kota Semarang melalui responsnya telah menyatakan dalam beberapa permasalahan telah melakukan antisipasi terhadap kasus yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Feri Alfaozan sebagai berikut;

“Dampak yang dapat dirasakan Masyarakat dalam Kebijakan Kota Layak ini sangat tinggi artinya pemenuhan hak anak dan Perlindungan Anak di Kota Semarang telah menjadi konsens penting dalam pembangunan Kota Semarang contoh : Penanganan stunting yang menjadi Isu Nasional Kota Semarang telah memiliki *Daycare* Rumah PELITA, Taman atau Ruang.”

Feri dalam pernyataannya dapat dijelaskan bahwa melalui KLA ini berbagai permasalahan anak dapat diatasi dengan baik. Artinya melalui KLA memunculkan dampak besar dari pelaksanaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak. Hal tersebut menjadi konsensus bagi Pembangunan Pemerintahan Kota Semarang dalam segi KLA.

Feri Alfaozan dalam pernyataan lain juga menambahkan bahwa, keberadaan DP3A Kota Semarang terhadap kondisi permasalahan anak di Kota Semarang juga sebagai inisiator untuk memberikan solusi. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut, “Solusi merupakan pemecahan masalah dengan memperhatikan Prinsip Hak Anak yakni Non diskriminasi, Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Hidup, tumbuh dan berkembang, dan partisipasi Anak/suara Anak.”

Feri menjelaskan bahwa, DP3A Kota Semarang merupakan salah satu lembaga yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan anak di Kota Semarang. Solusi itu diberikan kepada permasalahan anak dengan prinsip hak anak non diskriminatif, mementingkan kepentingan terbaik bagi anak, dan partisipasi terhadap anak. Melalui kesadaran tersebut DP3A menginginkan terwujudnya kasus penanganan permasalahan anak yang baik sesuai dengan kaidah implementasi KLA.

Selanjutnya, oleh Feri Alfaozan juga menjelaskan, beberapa konsensus juga dapat diwujudkan akuntabilitasnya melalui program pembangunan fisik DP3KA Kota Semarang yang berorientasi pada nilai “Ramah Anak”. Hal ini diwujudkan oleh DP3A Kota Semarang melalui pernyataan Feri Alfaozan sebagai berikut;

“Pertanggung Jawabannya dapat di Akses oleh Publik dengan sudah banyak sarana Prasarana Khususnya Taman Ramah Anak yang telah di bangun dan ada 2 taman yang sudah memiliki Sertifikat Ruang Bermain Ramah Anak dari Kementrian PPPA yakni Taman Kedondong Kel. Lamper Tengah dan Taman Bumirejo Kelurahan Puduk Payung, Unit pendidikan di Kota Semarang sudah menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA) dari Tingkatan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA, STM dan SLB.”